



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017 DENGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyelarasan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2013-2014 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017 DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Perwalkot ini adalah menyelaraskan SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Perencanaan penganggaran.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. Penyelarasan Nomenklatur SKPD pada tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Tasikmalaya Pada Bab VII dan Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada Bab VIII RPJMD sesuai dengan Peraturan Daerah;
  - b. Penyelarasan SKPD Penanggungjawab /pelaksana Urusan dan Program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelarasan Nomenklatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

- (3) Penanggungjawab /pelaksana Urusan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

#### BAB IV SUBSTANSI PENYELARASAN RPJMD

##### Pasal 4

- (1) Memindahkan dan/atau menggabungkan Urusan dan program yang tercantum dalam RPJMD kepada SKPD penanggungjawab/pelaksana sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (2) SKPD Penanggungjawab/Pelaksana bertanggungjawab dan melaksanakan Urusan dan Program dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomr 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 April 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 36 Tahun 2014  
TANGGAL  
TENTANG  
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-  
2017 DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA

PENYELARASAN NOMENKLATUR SKPD

Tabel 7.1.  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
1.	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	1. Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)	1. Program peningkatan disiplin aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD	Semua SKPD
		2. Optimalisasi manajemen kepegawaian	2. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur			
				3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			
				4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS			
2.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Penataan organisasi perangkat daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan	1. Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP (unit)	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD	Semua SKPD
		2. Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	2. Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%)	2. Program pelayanan administrasi perkantoran			
			3. Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)	3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			
				4. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan			
				5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai sampai ke tingkat kelurahan	Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)	1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD	Semua SKPD
				2. Program peningkatan fasilitas pendukung kerja pemerintahan			
				3. Program pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan pemerintahan			
				4. Program pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan			
4.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan pendapatan daerah (triliun)	1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD)	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Dinas Pendapatan	1. Dinas Pendapatan Daerah
		2. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi	2. Opini laporan keuangan pemerintah daerah	2. Program pengendalian pendapatan daerah		2. Sekretariat Daerah	3. Sekretariat Daerah
				3. Program pengendalian, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah		3. Semua SKPD	4. Semua SKPD
				4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
				5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
5.	Meningkatnya pelayanan publik	1. Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik	1. Jumlah unit pelayanan yang bersertifikat ISO	1. Program pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Sekretariat Daerah	1. Sekretariat Daerah
		2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city	2. Indek Kepuasan Masyarakat	2. Program peningkatan pelayanan publik		2. Sekretariat DPRD	2. Sekretariat DPRD
		3. Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan	3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)	3. Program peningkatan pelayanan perijinan	2. Kependudukan dan catatan sipil	3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
				4. Program fasilitasi prasarana pelayanan publik		4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5. kecamatan		
				6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.			
				7. Program penataan administrasi kependudukan			
				8. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
6.	Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat	1. Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat	1. Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah)	1. Program penataan peraturan perundang-undangan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Sekretrariat Daerah	1. Sekretrariat Daerah
		2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan demokrasi	2. Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah)	2. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan		2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			3. Penegakan Peraturan Daerah (%)	3. Program perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif			
			4. Partisipasi pada Pemilu (%)	4. Program pengembangan wawasan kebangsaan			
				5. Program pendidikan politik masyarakat			
7.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%)	1. Program perencanaan pembangunan daerah	1. Perencanaan pembangunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengawasan	2. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah)	2. Program perencanaan kerja	2. Statistik	2. Kecamatan	2. Kecamatan
			3. Nilai Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (%)	3. Program perencanaan pembangunan ekonomi	3. Penataan ruang	3. Dinas Pendidikan	3. Dinas Pendidikan
				4. Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)		4. Program perencanaan sosial budaya	4. Dinas Kesehatan
			5. Program perencanaan tata ruang dan tata bangunan (tata kota)		5. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	5. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	
			6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	6. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	6. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan		
			7. Program pengembangan data / informasi	7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat		
			8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	8. Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah	8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah		
			9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		
			10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi		
			11. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
	12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
						13. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup	13. Kantor Lingkungan Hidup
						14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						15. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	15. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Mendorong aparatur dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk) 2. Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk) 3. Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk) 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	1. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
9.	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat 2. Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan sosial	1. Konflik antar pemeluk agama (kasus) 2. Konflik masyarakat 3. Penanganan konflik masyarakat (kasus)	1. Program peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Program fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 2. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	1. Sekretariat Daerah 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Sekretariat Daerah 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan 2. Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point) 2. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%)	1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program peningkatan jalan dan jembatan 3. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan 5. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6. Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong 7. Program pembangunan / rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar 8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 9. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 10. Program fasilitasi pengadaan tanah pemerintah	Pekerjaan umum	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan



No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan		
11.	Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku	Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (point)	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi		
				2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya				2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
				3. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya					
				4. Program pengendalian banjir					
12.	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	1. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai	1. Rasio ijin trayek (per 10.000)	1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunkasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunkasi dan Informatika		
				2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat				2. Jumlah terminal angkutan darat / bis (unit)	2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
		3. Jumlah jaringan komunikasi (unit)	3. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi						
			4. Web site pemerintah daerah/SKPD						4. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
									5. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
									6. Program peningkatan pelayanan angkutan
									7. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
									8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
									9. Program peningkatan pelayanan lalu lintas
									10. Program peningkatan optimalisasi perhubungan
									11. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
									12. Program kerjasama informasi dan media massa
									13. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
									13.
2. Meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah kota	2. Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%)	2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan							
			3. Persentase penanganan sampah (%)						
14.	Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang	1. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial	1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (point)	1. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Penataan Ruang	1 Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	1 Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan		
				2. Mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh semua				2. Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	2. Program pengelolaan areal pemakaman
		3. Program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman							
		4. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertanian dan Pemakaman							
		5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
15.	Pengendalian sumber daya alam, lingkungan dan penyediaan energi	1. Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan (%)	1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Lingkungan Hidup	1. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	1. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan penyediaan energi bagi masyarakat	2. Rumah tangga pengguna listrik (%)	2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2. Penataan ruang	2. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	2. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
				3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	3. Energi dan sumber daya mineral	3. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup	3. Kantor Lingkungan Hidup
				4. Program peningkatan pengendalian polusi	4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
				5. Program rehabilitasi hutan dan lahan			
				6. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			
				7. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			
16.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat	1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, dan industri kreatif berbasis potensi lokal	1. Pertumbuhan PDRD/ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Perdagangan	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing dibidang pariwisata melalui wisata kulier dan ekowisata	2. PDRB Perkapita (juta Rp.)	2. Program peningkatan fasilitas pelayanan pasar	2. Industri	2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		3. Meningkatkan produktivitas pertanian	3. Laju Inflasi Kota (%)	3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	3. Pariwisata	3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		4. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	4. Indek Daya Beli (point) 5. Index Gini (point)	4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	4. Pertanian	4. Kecamatan	
5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	5. Kehutanan						
6. Program pengembangan destinasi pariwisata	6. Kelautan dan perikanan						
7. Program pengembangan kemitraan pariwisata	7. Ketahanan Pangan						
8. Program pengembangan pemasaran pariwisata							
9. Program peningkatan kesejahteraan petani							
10. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan							
11. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan							
12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							
13. Program peningkatan produksi hasil peternakan							
14. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan							
15. Program peningkatan ketahanan pangan							
16. Program penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian							
17. Program peningkatan SDM pertanian							
18. Program pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan							
19. Program pengembangan budidaya perikanan							
20. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan							
21. Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar							
22. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan							
23. Program Peningkatan Produksi Perikanan							

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan	
17.	Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya	1. Mengembangkan jiwa wirausaha dan usaha mikro, kecil serta menengah	1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1. Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan mikro sampai tingkat Kelurahan	2. Persentase koperasi aktif (%)	2. Program pengembangan industri kecil dan menengah	2. Perdagangan			
				3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	3. Industri			
				4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi				
18.	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Melakukan promosi daerah dan pemberian insentif bagi investor	1. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah)	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1. Penanaman modal	1. Sekretariat Daerah	1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	
			2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rp.)		2. Ketenagakerjaan			2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal berbasis teknologi informasi  2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan, tenaga kependidikan serta tata kelola pendidikan dengan pengembangan kurikulum berbasis akhlakul karimah dan lifeskill  3. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan yang mudah diakses	1. Angka melek huruf (%)	1. Program pendidikan anak usia dini	1. Pendidikan  2. Perpustakaan	1. Dinas Pendidikan	1. Dinas Pendidikan	
			2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan dan dua belas tahun				
			3. Indeks Pendidikan (point)	3. Program pendidikan menengah				
				4. Angka kelulusan per jenjang pendidikan (%)				4. Program pendidikan non formal
				$\frac{SD}{MI}$				5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
			$\frac{SMP}{MTs}$	6. Program manajemen pelayanan pendidikan				
			$\frac{SMA}{MA / SMK}$	7. Program peningkatan fasilitas pendukung kerja bidang pendidikan				
			5. Persentase pendidikan yang ditamatkan (%)	8. Program pelayanan administrasi persekolahan				
			$\frac{SD}{MI}$	9. Program fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)				
			$\frac{SMP}{MTs}$					
			$\frac{SMA}{MA / SMK}$	10. Program peningkatan mutu dan prestasi belajar				
			6. Angka Partisipasi Kasar (%)	11. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				
$\frac{SD}{MI}$	12. Program pengembangan budaya baca dan perpustakaan							
$\frac{SMP}{MTs}$								
$\frac{SMA}{MA / SMK}$								
7. Angka Partisipasi Murni (%)								
$\frac{SD}{MI}$								
$\frac{SMP}{MTs}$								
$\frac{SMA}{MA / SMK}$								
20.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan  2. Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat	1. Angka Kematian Bayi Registrasi (per 1.000)	1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan	1. Dinas Kesehatan	
			2. Angka usia harapan hidup (tahun)	2. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan				
			3. Indek Kesehatan (point)	3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan				
			4. Angka Kematian Ibu Registrasi (per 100.000)	4. Program upaya kesehatan masyarakat				

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan		
			5. Persentase balita gizi buruk (%)	5. Program perbaikan gizi masyarakat 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 8. Program pengembangan lingkungan sehat 9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 13. Program obat dan perbekalan kesehatan 14. Program peningkatan pelayanan rumah sakit 15. Program standarisasi administrasi kesehatan 16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 17. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 18. Program peran serta peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat 19. Program standarisasi pelayanan kesehatan 20. Program peningkatan kesejahteraan SDM rumah sakit 21. Program peningkatan pengelolaan keuangan rumah sakit					
21.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan sosial lainnya	1. Angka Kemiskinan (%)	1. Program penanggulangan kemiskinan perkotaan	1. Sosial	1. Sekretariat Daerah	1. Sekretariat Daerah		
		2. Mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2. Program peningkatan kesempatan kerja	2. Pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan		
		3. Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi dunia usaha dunia	3. Rasio penduduk yang bekerja (point)	3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	3. Ketenagakerjaan	3. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan	3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		4. Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wiras usaha baru	4. Tingkat Partisipasi Angka Kerja (%)	4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	4. Ketransmigrasian	4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
		5. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja		5. Program transmigrasi regional 6. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat					
22.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	1. Program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Sosial	1. Sekretariat Daerah	1. Sekretariat Daerah		
				2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				3. Program pembinaan anak terlantar					

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
						Sebelum penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
				4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 6. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			
23.	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Mendorong keluarga berencana yang kecil, mandiri dan sejahtera	Total Fertility Rate (TFR)	1. Program keluarga berencana 2. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Program kesehatan reproduksi	1. Kependudukan dan catatan sipil 2. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Menjamin perlindungan anak dan perempuan	Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan	Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)	1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
25.	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Mendorong peran perempuan dan pemuda untuk lebih aktif dalam pembangunan	1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 2. Jumlah organisasi kepemudaan (buah)	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3. Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Pemuda dan olah raga	1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	Pelestarian seni budaya dan olahraga	1. Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku seni budaya dan olahraga 2. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga	1. Jumlah grup kesenian (buah) 2. Jumlah gedung kesenian (buah) 3. Jumlah klub olahraga (buah) 4. Jumlah gedung olahraga (buah)	1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan kekayaan budaya 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 5. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 6. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1. Pemuda dan olah raga 2. Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 36 Tahun 2014  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017 DENGAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KOTA TASIKMALAYA

PENANGGUNGJAWAB /PELAKSANA URUSAN DAN PROGRAM

Tabel 8.1.  
 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan  
 RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>			590.424.943.592,44		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi pemeliharaan kesehatan TKK	100% 420 orang	247.345.973.637,25	Semua SKPD	Semua SKPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	171.765.978.403,37	Semua SKPD	Semua SKPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan pembinaan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus	100% 100%	9.081.815.451,29	Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Capil, KPLH, Dinas KUMKM Perindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec. Tamansari, Kec. Cihideung, Kec. Cipedes, BPPT, Satpol PP, Kantor Arsip, Dinas Pertanian	Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Capil, KPLH, Dinas KUMKM Perindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec. Tamansari, Kec. Cihideung, Kec. Cipedes, BPPT, Satpol PP, Kantor Arsip, Dinas Pertanian
	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Pindah / Purna Tugas PNS	2 Orang	20.000.000,00	KPLH	Kantor LH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rutin)	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur Cakupan peningkatan kapasitas aparatur melalui Diklat Formal Tersedianya Aparatur yang berkualitas dan kompeten di bidangnya	100% 3.402 orang 80 orang	28.272.768.820,71	RSUD, Bappeda, KPLH, KUMKMPerindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Tamansari, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Satpol PP, Kantor Arsip	RSUD dr. Soekardjo, Bappeda, Kantor LH, Dinas KUMKMPerindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Tamansari, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kantor Satpol PP, Karpusda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	495 dokumen	3.460.814.309,96	Semua SKPD	Semua SKPD
	Program Pelayanan Administrasi Persekolahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Persekolahan	100%	68.297.388.414,83	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya pelayanan puskesmas dan jaringannya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000)	100% 0,17	22.952.150.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100%	32.554.874.929,85	Kecamatan	Kecamatan
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan	Terseleenggaranya Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan	100%	462.766.580,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Perencanaan Kerja	Tersedianya RPJMD Tersedianya RKPD Tersedianya Renstra Tersedianya Renja	1 dokumen 5 Dokumen 33 Dokumen 165 Dokumen	2.287.334.191,29	Semua SKPD	Semua SKPD
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)	100%	3.923.078.853,89	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	<b>PROGRAM MENURUT URUSAN</b>			1.803.193.549.387,54		
	<b>I URUSAN WAJIB</b>			1.663.797.697.954,57		
	<b>1 URUSAN PENDIDIKAN</b>			159.564.611.507,25		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Sekolah TK	8401,00% 78,22%	704.260.293,56	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	86,64% 99,91%	11.064.521.732,07	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
1	2	3	4	5	6	7
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	74,59%			
		Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1/395			
		Rasio Guru terhadap Murid	1 : 10			
		Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata	1 : 10			
		Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf (tidak Buta Aksara)	100,00%			
		Sekolah Pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	97,71%			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	0			
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	100,00%			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi	83,00%			
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket A	100,00%	1.109.284.365,58	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket B	100,00%			
		Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket C	100,00%			
		Angka Melek Huruf	99,90%			
		Jumlah Lulusan LPK				
	Program Pendidikan Luar Biasa			-		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	2.083.290.150,00	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Guru yang sudah Tersertifikasi	92,00%			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, fasilitasi perpustakaan kelurahan/ OPD, Penyediaan bhn pustaka, Pemasyarakatan minat baca, pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	243.836.627,00	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersusunnya Database Pendidikan	89,00%	4.458.782.035,32	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar	Prestasi yang dicapai tingkat Internasional		3.246.685.948,05	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Prestasi yang Dicapai Tingkat Nasional	18			
		Prestasi yang dicapai tingkat Provinsi	70			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97,00%	133.407.264.407,62	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	94,00%			
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	99,99%			
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	99,15%			
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI	113,27%			
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	102,49%			
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,04%			
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	93,21%			
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%			
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%			
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,79%			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	99,64%			
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang	Jumlah Gedung Terbangun	25	3.246.685.948,05	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan	Jumlah Gedung Terehabilitasi	325			



NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN KESEHATAN			473.579.362.545,26		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat Pemenuhan Kebutuhan Obat Pelayanan Dasar	100% 100%	14.803.814.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan BUMIL K-4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan Penjangkaran Kesehatan siswa SD Angka Kelangsungan Hidup Bayi Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	96,00 85,00 91,00 91,00 83,00 97,00 100,00 990,08 54,00 75,00 100% 69,00 100%	9.890.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Rumah Tangga yang ber PHBS Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan	83,00 100%	549.425.000,00	Dinas Kesehatan, Kecamatan Indihiang	Dinas Kesehatan, Kecamatan Indihiang
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya Persentase balita gizi buruk	100,00 100,00 0,14 0,21	2.557.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih Cakupan rumah tangga pengguna jamban sehat Frekuensi pengembangan lingkungan sehat	74,00 71,00 1.720 kali	4.187.873.667,28	Dinas Kesehatan, Kecamatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC AFP rate > 2/100.000 pddk<15 tahun	100,00 100,00 90,00 8,40	3.809.946.134,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian % kepuasan pelanggan Terbentuk dan berfungsinya gugus penjamin mutu RS Kejadian Infeksi Nosokomial Terakreditasinya RS BOR ALOS BTO TOI	100% 90% 1 Komite Mutu RS dan 4 dok laporan periodik komite mutu maks 1.5 % 0,00 70 - 85% 7-10 hari 40-50 kali 1-3 hari	24.754.984.567,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	% resep yang terlayani Penulisan resep sesuai formularium % tingkat pemenuhan alat-alat kesehatan sesuai standar	100,00% 100,00% 90,00%	237.172.046.789,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	maksimal 80 %	7.571.689.757,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100,00%			
		Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%			
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Misikin	100	5.305.704.813,00	Dinas Kesehatan, RSUD	Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo
		Jumlah Kemitraan	7			
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85,00	979.745.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	97,00			
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	93,00			
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia	35,00	558.366.100,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit	Pemberian Jasa Pelayanan	12 bulan	22.429.240.781,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
	Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	% RW Siaga Aktif	80,00	341.669.818,00	Dinas Kesehatan, RSUD	Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bangunan Puskesmas Kondisi baik	100,00	26.327.260.539,98	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	100,00			
	Program Standarisasi Administrasi Kesehatan	Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	5 dokumen	356.314.813,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya instalasi PKRS dan Kehumasan	1 Instalasi PKRS & Kehumasan	97.441.266.912,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
		Tersedianya Informasi layanan Rumah Sakit melalui website	100,00%			
		Respon penanganan complain	<1x24 jam			
	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	Billing system berfungsi	100%	4.543.013.854,00	RSUD	RSUD dr. Soekardjo
		% Penggunaan pendapatan untuk belanja	<80%			
		% piutang perorangan yang diproses dengan tepat waktu (sesuai Agreement)	90%			
3	PEKERJAAN UMUM			374.103.739.723,49		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersediannya jalan yang menghubungkan PPK, SPK dan PL di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan antar Pemerintah Daerah (Kab Ciamis dan Kab Tasikmalaya)	8 unit jembatan Mangin dan 1 unit jembatan Ciloseh	22.000.000.000,00	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi. Pengairan, Pertambangan dan Energi (BMPPE)
		Tersusunnya rencana teknis Jalan dan jembatan yang komprehensif	4 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 8 kecamatan			
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Prosentase drainase/ gorong-gorong terbangun	48,00	25.888.140.509,30	Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharannya kondisi jalan dan jembatan	300 km	182.113.939.113,09	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
		Tersediannya Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Menjamin Kendaraan dapat bergerak dengan nyaman	143,35 km			
	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tersediannya data Aktual	1 dokumen	197.434.511,32	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersediannya Sarana Prasarana Kebinamargaan	2 unit	2.500.000.000,00	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	75,00%	33.742.566.042,24	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air baku	Cakupan pelayanan air baku		-		
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya sarana pelestarian air tanah	5 titik	290.476.250,00	KPLH	Kantor LH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	58,00	43.997.328.972,40	Dinas Cipta Karya, KPLH	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Kantor LH
		Persentase layanan air limbah	36,80			
		Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah	1 paket			
	Program Pengendalian Banjir	Tertanganannya Daerah Rawan Banjir di Daerah Aliran Sungai Cikalang, Sungai Cihideug Sungai Cinutut	Sungai Cihideug - Sungai Ciromban, Sungai Cikalang	13.563.040.558,99	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan lingkungan/jalan setapak/drainase	74,00	1.798.144.234,87	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Menjamin Kendaraan dapat bergerak dengan nyaman	19,162 km	27.465.772.985,22	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase terpeliharanya saluran drainase	68,00	9.299.755.380,09	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
	Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar	Persentase terbangunnya dan terpeliharanya trotoar	17,00	11.247.141.165,98	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
4	PERUMAHAN			107.735.075.660,11		
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	60,00	513.755.495,68	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase area pemakaman yang representatif	100,00	1.725.000.000,00	Dinas Cipta Karya, Dinsosnakertrans	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinsosnakertrans
		Terpeliharanya areal TMP	100			
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman	Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman	100,00	3.344.142.349,79	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman	Rasio permukiman layak huni	70,00	102.152.177.814,64	Dinas Cipta Karya, Bappeda	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan perumahan serta permukiman	10 Dokumen			
5	PENATAAN RUANG			5.973.463.842,27		
	Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Daerah	15 Dokumen	5.588.606.783,97	Dinas Cipta Karya, Bappeda	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bappeda
	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dokumen pengendalian pemanfaatan Ruang	5 dokumen	384.857.058,30	Dinas Cipta Karya	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			22.342.054.120,25		
	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya peta pembiayaan kesehatan	100,00%	1.623.403.003,67	Dinas Kesehatan, Bappeda, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari	Dinas Kesehatan, Bappeda, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen			
		Tersedianya dan tersusunnya data dan Informasi	1 Dokumen			
		Kecamatan dalam Angka	1 dokumen			
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	150 Orang	146.955.623,91	Bappeda	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah		17.222.351.479,50	Bappeda, Kecamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas cipta Karya, Satpol PP, Kantor Arsip, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, KUMKM Perindag, Kantor Kesbang, KPLH, Disdukcapil, KBPP, Dinsosnakertrans, Disbudparpora	Bappeda, Kecamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas cipta Karya, Satpol PP, Kantor Arsip, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, KUMKM Perindag, Kantor Kesbang, KPLH, Disdukcapil, KBPP, Dinsosnakertrans, Disbudparpora
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	1 Dokumen			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Walikota	5 Dokumen			
		Tersedianya dokumen hasil Musrenbang	130 Dokumen			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	4 Dokumen	1.282.021.314,78	Bappeda	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	5 Dokumen	2.067.322.698,40	Bappeda	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana			-		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
7	PERHUBUNGAN			30.796.874.548,05		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	77%	1.556.718.180,00		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	PJU Kondisi baik	70%	4.722.554.472,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
		Rambu lalu Lintas Kondisi baik	80%			
		APILL Kondisi baik	98%			
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	6.524.803	5.903.537.429,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
		Jumlah orang melalui terminal	359.219			
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	714.893			
		Rasio Ijin Trayek	0,00217			
		Jumlah Terminal Bis	6			
		Angkutan Darat	0,432%			
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	77%	858.600.084,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Pemasangan PJU	2.130	12.222.432.666,05	Dinas Perhubungan, Setda	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Setda
		Jumlah Keseluruhan PJU Terpasang	5.473			
		Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas	261			
		Jumlah Keseluruhan Rambu Lalu Lintas Terpasang	1.685			
		Jumlah Pemasangan APILL	25			
		Jumlah Keseluruhan APILL Terpasang	75			
		Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan lalu lintas	5 Tahun			
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	15.274	2.710.119.441,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
		Kepemilikan KIR angkutan umum	12,93%			
		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	40			
		Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum	85.000			
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	Jumlah SDM Pengamanan	45	1.652.871.683,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan	Penghargaan Bidang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN)	5	1.170.040.593,00	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
8	LINGKUNGAN HIDUP			36.055.721.904,86		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	44,67	11.610.731.252,11	KPLH, Dinas Cipta Karya	Kantor LH, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
		Persentase Penanganan Sampah	56,56			
		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1 paket			
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	40 objek, 2 unit IPAL, 50% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	5.095.463.426,00	KPLH	Kantor LH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah sempadan sungai/ situ dan sumber mata air	5 paket	10.689.932.547,31	KPLH, Dinas Bina Marga	Kantor LH, Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
		Pengawasan terhadap rehabilitasi akibat kegiatan yang merusak lingkungan SDA	5 paket			
		Tersedianya jaringan air dari kawah gunung galunggung sepanjang 17 KM	17 km			
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya informasi status lingkungan hidup, kajian lingkungan dan KLHS	4 Dokumen	581.700.000,00	KPLH	Kantor LH
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi gas buang kendaraan dan industri	5 titik	119.052.104,00	KPLH	Kantor LH
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,00	7.958.842.575,45	Dinas Cipta Karya, KPLH	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Kantor LH
		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 paket			
9	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			16.048.470.540,00		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan	93,67%	16.048.470.540,00	Disdukcapil	Disdukcapil
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	95,00%			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio bayi berakte kelahiran	70,44%			
		Kepemilikan KTP	494.445 orang			
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.964.329.557,00		
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan SDM dan Stakeholder dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan	545 orang	780.000.000,00	KBPP	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tercapainya pelaksanaan sosialisasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota	100%	1.310.000.000,00	KBPP	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Optimalisasi lembaga P2TP2A 100 %	100%	1.856.112.134,00	KBPP	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terwujudnya Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	677 Kali	1.018.217.423,00	KBPP, Setda, Kecamatan	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Setda, Kecamatan
11	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			8.494.860.627,21		
	Program Keluarga Berencana	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100%	2.355.945.000,00	KBPP	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2.232 kali	4.976.006.137,21	Kecamatan, KBPP, Setda	Kecamatan, Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Setda
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 70%	100%			
		Terlaksananya kegiatan pelatihan dan workshop bagi kader.	100%			
	Program Kesehatan Reproduksi	PUS Istri dibawah usia 20 tahun 3,5 %	100%	1.162.909.490,00	KBPP	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
12	SOSIAL			22.434.889.801,57		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	66,5	5.210.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans, BPBD
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penanganan Anak Terlantar	100 Orang	800.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya aksesibilitas para penyandang cacat dan trauma	5,04	500.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
	Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	400 Orang	400.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Meningkatnya kemandirian dan kesadaran para eks penyandang penyakit sosial	700 Orang	2.150.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Instrumen kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial	1 Dokumen	9.018.974.396,58	Dinsosnakertrans, Setda	Dinsosnakertrans, Setda
		Pemahaman masyarakat akan mekanisme fasilitasi kelembagaan kesejahteraan Sosial	8.681 penerima			
		Akurasi data lembaga/ organisasi yang memperoleh bantuan pemberdayaan	2.500 organisasi			
		Akurasi data lembaga/ organisasi penerima bantuan pemberdayaan bidang keagamaan	6.015 Lokasi			
		Apresiasi terhadap masyarakat berprestasi	1.895 orang			
		Akurasi data RTLH yang akan memperoleh bantuan	1.701 unit			
		Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan (Bhakti Siliwangi dan Bhakti Gotongroyong)	5 Kecamatan/69 Kelurahan			
		Fasilitasi penunjang kegiatan HUT RI	5 kegiatan			
	Meningkatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial	814 Orang				

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Menurunnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Wilayah Kota Tasikmalaya	17,27	4.355.915.404,99	Dinsosnakertrans, Bappeda	Dinsosnakertrans, Bappeda
		Fasilitasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%			
13	KETENAGAKERJAAN			10.065.000.000,00		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,51	2.900.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
		Rasio ketergantungan	49,00			
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	9,01	4.725.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,15			
		Rasio penduduk yang bekerja	90,99			
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pembinaan Ketenagakerjaan	2.600 orang	2.440.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
14	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			6.045.000.000,00		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang aktif pada "Imah Tasik"	100	3.995.000.000,00	KUMKM Perindag	Dinas KUMKM Perindag
		Meningkatnya volume usaha koperasi	0,15			
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	0,36	2.025.000.000,00	KUMKM Perindag	Dinas KUMKM Perindag
	Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	2 kali	25.000.000,00	Kecamatan Cibeureum	Kecamatan Cibeureum
15	PENANAMAN MODAL			6.126.547.388,30		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	9 Sektor	6.126.547.388,30	KUMKM Perindag, Setda	Dinas KUMKM Perindag, BPMPPPT
		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	40 kali			
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	11 kali			
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	11 kali			
		Jumlah event pameran yang diikuti	29			
		Jumlah investor berskala nasional PMDN dan PMA	2			
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah			-		
16	KEBUDAYAAN			5.224.923.002,58		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya Pengembangan Nilai Budaya	4 kali	87.602.263,37	Kecamatan Cihideung	Kecamatan Cihideung
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cagar Budaya Kondisi Baik	2 Buah	115.913.769,39	Disbudparpora	Disbudparpora
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Group Kesenian	53 Group	5.021.406.969,82	Disbudparpora	Disbudparpora
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			13.532.868.521,40		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terpilihnya Putra dan putri terbaik sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota	20 orang	4.379.192.692,95	Disbudparpora, Dinsosnakertrans	Disbudparpora, Dinsosnakertrans
		Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan	61 Kali			
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	7 Kali	1.452.688.076,99	Disbudparpora	Disbudparpora
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat	5 kali	5.203.192.328,18	Disbudparpora, Sekretariat Dewan Korpri, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu, Kec. Bungursari	Disbudparpora, Sekretariat Dewan Korpri, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu, Kec. Bungursari
		Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan	37 kali			
		Jumlah cabang olahraga				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	24 Unit	2.497.795.423,28	Disbudparpora	Disbudparpora
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			22.692.780.085,57		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	3.260.475.000,00	Satpol PP, Kec. Purbaratu	Kantor Satpol PP dan Linmas, Kec. Purbaratu
		Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5 paket kegiatan			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas yang tertangani	2	1.225.000.000,00	Satpol PP	Kantor Satpol PP dan Linmas, Kec. Purbaratu
		Jumlah Demonstrasi	46 kali			
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan	80 kali	11.344.570.985,57	Kantor Kesbangpol, Setda, Kecamatan	Kantor Kesbangpol, Setda, Kecamatan
		Cakupan Peserta/Masyarakat yang memahami HAM	500 Orang			
		Internalisasi nilai kebangsaan melalui peringatan hari jadi	45 kali rangkaian kegiatan			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penanganan Kasus Pekat	278 kasus	1.500.099.100,00	Satpol PP	Kantor Satpol PP
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terciptanya Pendidikan Politik Masyarakat	100%	5.362.635.000,00	Kantor Kesbangpol, Satpol PP	Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP dan Linmas
		Terlaksananya Pemilukada yang aman dan tertib	100%			
19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			314.923.842.244,89		
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah regulasi	48 Regulasi	83.792.146.657,46	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pelayanan	648 Kegiatan	1.555.363.607,98	Setda	Setda
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data pendapatan yang akurat dan akuntabel	16 dokumen	39.484.733.968,05	Setda, Dispenda, Dinas Pendidikan	BPKBD, Dispenda, Dinas Pendidikan
		Instrumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	15 Buah Perda dan 45 Buah Perwalkot			
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Buah Perda dan 5 buah Perwalkot			
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel	70 dokumen			
		Sistem penggajian yang sistematis	5 dokumen			
		Pemahaman dan Kinerja Bendahara dalam penatausahaan kebendaharaan	33 Bendahara SKPD			
		Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	32 OPD			
		Akurasi administrasi verifikasi	5 Tahun Anggaran			
		Optimalisasi penganggaran daerah	5 Tahun			
		Tersedianya sarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	5 paket			
		Penatausahaan Keuangan Setda yang akurat dan akuntabel	5 Dokumen			
		Koordinasi Antar Stakeholders Perekonomian dan Pengendalian Inflasi	5 Tahun			
		Dokumen bahan penyusunan neraca pemerintahan daerah	30 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)			
		Tersedianya dokumen pencatatan aset	5 dokumen			
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			-		



NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	10.055.768.562,91	Inspektorat	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan fungsional	100%	285.427.442,60	Inspektorat	Inspektorat
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya perlengkapan akses informasi	1 paket	3.160.088.328,07	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Bappeda, KBPP, Setda, Disbudparpora, BPPT	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Bappeda, BKBPMPPPA, Setda, Disbudparpora, BPPPT
		Tersedianya akses informasi	100%			
		Data Laporan Pembangunan Daerah yang Up to Date berbasis Teknologi Informasi	33 OPD			
		Meningkatnya data & informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir	100,00			
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Daerah yang ditetapkan	48 Dokumen Perda	5.251.120.734,93	Setda	Setda
		Peraturan Walikota yang ditetapkan	115 Dokumen Peraturan Walikota			
		Data Perundang-undangan Tingkat Pusat	4(empat) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah			
		Cakupan Peraturan yang disosialisasikan, Cakupan Peserta Sosialisasi	2 buah Perda, 2 buah Undang-undang			
		Cakupan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pertanahan	100 Orang			
		Cakupan penyediaan dan distribusi sarana informasi peraturan perundang-undangan	300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat 1945-2013			
		Cakupan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta penyelesaian perkara/sengketa.	4 permasalahan hukum			
		Cakupan peningkatan kesadaran dan perilaku taat hukum	10 Kelompok pada 10 kelurahan			
	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12.019.986.793,72	Setda, Inspektorat, Satpol PP, Kecamatan	Setda, Inspektorat, Kantor Satpol PP dan Linmas, Kecamatan, BPKBD
		LAKIP Kota Tasikmalaya	5 Dokumen			
		LAKIP OPD	5 Dokumen			
		Penetapan Kinerja	5 Dokumen			
		Road Map Reformasi Birokrasi	-			
		Terwujudnya Pengadaan barang dan jasa yang tertib dan akuntabel	100%			
		Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%			
		Cakupan peserta yang memahami Peraturan Pengadaan Barang/Jasa	750 Orang			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
		Kesesuaian RKA OPD dengan KUA-PPAS dan ketentuan yang berlaku	5 tahun/33 OPD			
		Cakupan pengendalian Pembangunan Bantuan Provinsi	15 OPD			
		Dokumen laporan pengendalian pembangunan bantuan provinsi di Kota Tasikmalaya	1 Dokumen			
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 tahun			
		Buku Pengantar RT	69 Kelurahan			
		Buku administrasi Kelurahan	69 Kelurahan			
		Cakupan evaluasi Kinerja Kelurahan	69 Kelurahan			
		Cakupan evaluasi Kinerja Kecamatan	10 Kecamatan			
		Cakupan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	10 Kecamatan/ 69 Kelurahan			
		Cakupan penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	69 Kelurahan			
		Data profil Kelurahan	69 Kelurahan			
		Dokumen LPPD dan IKK	5 Dokumen			
		Dokumen Memori	1 Dokumen			
		Terwujudnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	1.575 kali			
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%			
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	Cakupan peresmian hasil-hasil pembangunan	5 tahun/10 Kecamatan	47.213.821.872,79	Setda, Dinas Cipta Karya, Kec. Purbaratu	Setda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Kec. Purbaratu
		Terwujudnya Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	6 Kelurahan			
		Rasio Gedung Pemerintahan				
	Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah	Tersedianya daerah resapan air	55,954 M2	47.843.805.805,91	KPLH, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan	Kantor LH, Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan
		Tersedianya lahan guna keperluan sarana pendidikan	20.825 m2			
		Tersediannya Lahan untuk Jalan lingkaran Utara	3 Ha			
		Pembebasan Kekurangan Lahan Jalan Mangkubumi - Indihiang	0,6 Ha			
		Pembebasan Lahan untuk Work Shop dan Laboratorium	1 Ha			
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi Kelembagaan	2 Dokumen	6.398.106.312,97	Setda, Kantor Kesbangpol	Setda, Kantor Kesbangpol
		Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen Perda			
		Standar Operasional Prosedur	177 Unit Kerja			
		Dokumen Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit	50 Dokumen			
		Dokumen Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan UTU	2 Dokumen			
		Pemahaman atas penerapan Tata Naskah Dinas	43 Unit Kerja			
		koordinasi unsur pemerintahan daerah (Forkomda)	60 Kegiatan			
		Koordinasi antar pemerintah Kota (APEKSI)	20 Kegiatan			
		Fasilitasi Pemilu	1 Kegiatan			
		Terwadahnya pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan Narkotika	1 Unit			
		Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	100%			
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Terwujudnya pelayanan perijinan	100%	177.300.000,00	BPPT, Kec. Indihiang, Kec. Bungursari	BPMPPT, Kec. Indihiang, Kec. Bungursari
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat		3.436.801.123,46	BPPT, Kecamatan	BPMPPT, Kecamatan

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelarasan	Sesudah Penyelarasan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan dasar / beras bagi Keluarga Miskin	54.051 RTS	5.093.361.657,89	Setda	Setda
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD	48,23%	10.711.035.816,26	Dispenda, Setda	Dispenda, Setda
		Peningkatan Kinerja BUMD Pasar Resik	1 Tahun			
		Rintisan BUMD baru	6 BUMD			
	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	persentase pendapatan daerah	4,45%	217.688.959,58	Dispenda, Setda	Dispenda, Setda
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel melalui Penatausahaan Dana Transfer	32 OPD			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	persentase pendapatan daerah	32,29%	1.046.271.496,52	Dispenda, Setda	Dispenda, Setda
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel melalui Penatausahaan Dana Transfer	32 OPD			
	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Peraturan yang disosialisasikan, Cakupan Peserta Sosialisasi	8 buah Perda, 8 buah Undang-undang	1.779.734.483,80	Setda, Satpol PP	Setda, Kantor Satpol PP
		Cakupan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pertanahan	400 Orang			
		Cakupan penyediaan dan distribusi sarana informasi peraturan perundang-undangan	1200 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 1200 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 1200 buah Buku Produk Hukum Daerah 180 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 4 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2017			
	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan	691 kali	21.603.236.441,95	Setda, Kecamatan	Setda, Kecamatan
		meningkatnya upaya internalisasi nilai-nilai keagamaan	41 kegiatan			
		meningkatnya partisipasi dan prestasi dalam kegiatan keagamaan	2.849 orang			
		Apresiasi terhadap masyarakat yang berprestasi dalam bidang keagamaan	280 orang			
		Instrumen kebijakan untuk penerapan tata nilai keagamaan	1 dokumen			
	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	121 Kali	791.510.688,02	Kecamatan	Kecamatan
		Upaya Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama	10 kali			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur	385 Orang	89.146.000,00	Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Cihideung, Cipedes	Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Cihideung, Cipedes
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya aparatur	1.988 Orang	10.789.029.764,92	Setda, Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Cihideung, Cipedes	Setda, Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Cihideung, Cipedes
		Dokumen Anjab dan ABK	4 Dokumen			
		Dokumen Evaluasi Jabatan	2 Dokumen			
		Cakupan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan/kelurahan	4 Kali/10 Kecamatan/69 Kelurahan			
		Ckupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui ujian dinas	500 orang			
		Cakupan pengembangan aparatur melalui rekrutmen CPNS	467 orang			
		Cakupan pengembangan aparatur melalui pemrosesan tenaga honorer menjadi CPNS	720 orang			
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Karis Karsu 2500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 750 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	5 Tahun			
		Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui pengambilan sumpah/janji PNS	682 orang			
		Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui Perpanjangan Kontrak TTK	515 Orang			
		Data Base PNS Mutakhir	-			
		Dokumen Analisis Kebutuhan PNS	2 Dokumen			
		Terlaksananya proses Mutasi secara umum	23.698 orang			
		Terisinya formasi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan syarat kompetensi	4.000 orang			
	Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik	Fasilitasi pembentukan yayasan asrama haji	1 buah yayasan	75.000.000,00	Setda	Setda
	Program Perlakuan dan Perlindungan Hukum yang Tidak Diskriminatif	Cakupan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta penyelesaian perkara/sengketa.	19 permasalahan hukum	1.753.355.725,09	Setda	Setda
		Cakupan peningkatan kesadaran dan perilaku taat hukum	40 Kelompok pada 40 kelurahan			
	Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Data batas wilayah	3 Dokumen	300.000.000,00	Setda	Setda
		Tertatanya Batas Wilayah	80 titik			
20	KETAHANAN PANGAN			911.695.404,43		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan pangan utama	74,77%	911.695.404,43	Dinas Pertanian, Setda	Distankanhut, Setda
		Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat yang aktif	61 Gapoktan			
21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			317.662.000,00		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20 Kali	317.662.000,00	Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, Indihiang	Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, Indihiang
22	STATISTIK			4.959.438.064,38		
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Tersedianya Data Statistik Daerah	14 Dokumen	4.959.438.064,38	Bappeda, Dinas Kesehatan, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari	Bappeda, Dinas Kesehatan, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari
23	KEARSIPAN			660.255.300,00		
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan, 1 Perda, 2 kali kegiatan penyusutan arsip dan 1 kali pembinaan kearsipan	468.030.300,00	Kantor Arsip	Karpusda
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Terwujudnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah	1 dokumen Arsip Sejarah dalam bentuk digital	60.000.000,00	Kantor Arsip	Karpusda
	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	132.225.000,00	Kantor Arsip	Karpusda
24	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			15.312.040.329,71		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	82,81	4.690.814.118,86	Dinas Perhubungan, Setda	Dishubkominfo, Setda
		Jumlah Jaringan Komunikasi	0,066			
		Jumlah Wartel/ Warnet	0,342			
		Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah	33			
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Dokumen Kajian Bidang KOMINFO	3 Dokumen	196.947.379,00	Dinas Perhubungan	Dishubkominfo
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan	80	374.704.203,00	Dinas Perhubungan	Dishubkominfo
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	45	10.049.574.628,85	Setda, Sekretariat DPRD	Setda, Sekretariat DPRD
		Jumlah Penyiaran Radio/ TV Lokal	37			
		Pameran/ Expo	4			
		Penyebarluasan Informasi	60 Kali			

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
		Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	648 Kegiatan			
25	PERPUSTAKAAN			932.191.236,00		
	Program Pengembangan Budaya Baca	Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca	4 Sosialisasi, 4 Pembinaan perpustakaan, 4 Otomasi perpustakaan, 4 Penyediaan bahan pustaka, 4 Kegiatan Pemasarakatan minat baca, 4 pengembangan minat baca, 4 x Koordinasi pengembangan perpustakaan, 4 dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	932.191.236,00	Kantor Arsip	Karpusda
II	URUSAN PILIHAN			139.395.851.432,98		
1	PERTANIAN			22.504.000.000,00		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan permodalan	69 Gapoktan	330.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi pertanian	63 unit	680.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	25,00%	3.504.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100,00%	400.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	25,00%	3.130.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	15 kegiatan	1.410.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Terlaksananya penerapan teknologi peternakan	15 paket	750.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan pangan utama	77,35%	260.000.000,00	Dinas Pertanian, Setda	Distankanhut, Setda
		Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat yang aktif	61 Gapoktan			
	Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian	108 paket	10.800.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan SDM Pertanian	Peningkatan kualitas SDM pertanian	3 kegiatan	1.240.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
2	KEHUTANAN			9.692.571.000,00		
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	928,78 Ha	8.822.571.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan	Pengembangan hasil hutan non kayu	20.000 log jamur kayu, 200 stup lebah madu, 40 Ha PLBTH	870.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			18.708.151.087,05		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan	0,00%	1.334.044.812,28	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Keluarga Pra KS yang menikmati Fasilitas Listrik	9.085 KK	17.374.106.274,76	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik				
4	PARIWISATA			25.202.749.819,78		
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	18 Kali	2.994.116.839,50	Disbudparpora	Disbudparpora
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	38 Kali	20.645.138.480,18	Disbudparpora	Disbudparpora
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata	30 Kali	1.563.494.500,09	Disbudparpora	Disbudparpora
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN			22.169.000.000,00		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan komoditas unggulan perikanan	105 pokdakan	889.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana	
			Target	Rp	Sebelum Penyelesaian	Sesudah Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Peningkatan sarana penyuluh perikanan dan SDM penyuluh perikanan	71 orang, 2 paket	580.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan	50,00%	3.110.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Berkembangnya kawasan budidaya air tawar	26 lokasi	15.340.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pencapaian target daerah	100,00%	2.250.000.000,00	Dinas Pertanian	Distankanhut
6	PERDAGANGAN			13.691.852.914,94		
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan	-	3.219.000.000,00	KUMKM Perindag	KUMKM Perindag
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (dalam US\$)	0,70	200.000.000,00	KUMKM Perindag	KUMKM Perindag
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang dibina Sosialisasi Perda Ketertiban Umum	2 kecamatan 100,00%	500.000.000,00	KUMKM Perindag	KUMKM Perindag
		Relokasi PKL Pengawasan	1 lokus 100,00%			
	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar	Inventarisasi dan verifikasi piutang pasar tradisional	7 Pasar tradisional	9.772.852.914,94	KUMKM Perindag	KUMKM Perindag
		Tersusunnya DED Pusat Pasar Ekonomi Kreatif Produk Unggulan Daerah	1 dokumen			
		Terbangunnya Pusat Pasar Ekonomi Kreatif Produk Unggulan Daerah	1 unit			
7	INDUSTRI			26.552.526.611,21		
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			-		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina Fasilitasi penciptaan dan promosi alat/teknologi tepat guna	740 IKM 5 Kegiatan	23.252.526.611,21	KUMKM Perindag, Setda	KUMKM Perindag, Setda
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terwujudnya Pengembangan sentra-sentra industri potensial	35 sentra	3.300.000.000,00	KUMKM Perindag	KUMKM Perindag
8	KETRANSMIGRASIAN			875.000.000,00		
	Program Transmigrasi Regional	Transmigrasi Umum	175 KK	875.000.000,00	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
				2.393.618.492.979,99		

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN